



**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PERKEBUNAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan perencanaan dan Pembangunan penelitian dan pengembangan perlu disusun Rencana Kerja (renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow tentang penunjukkan Tim Pelaksanan Kegiatan Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817]);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19);

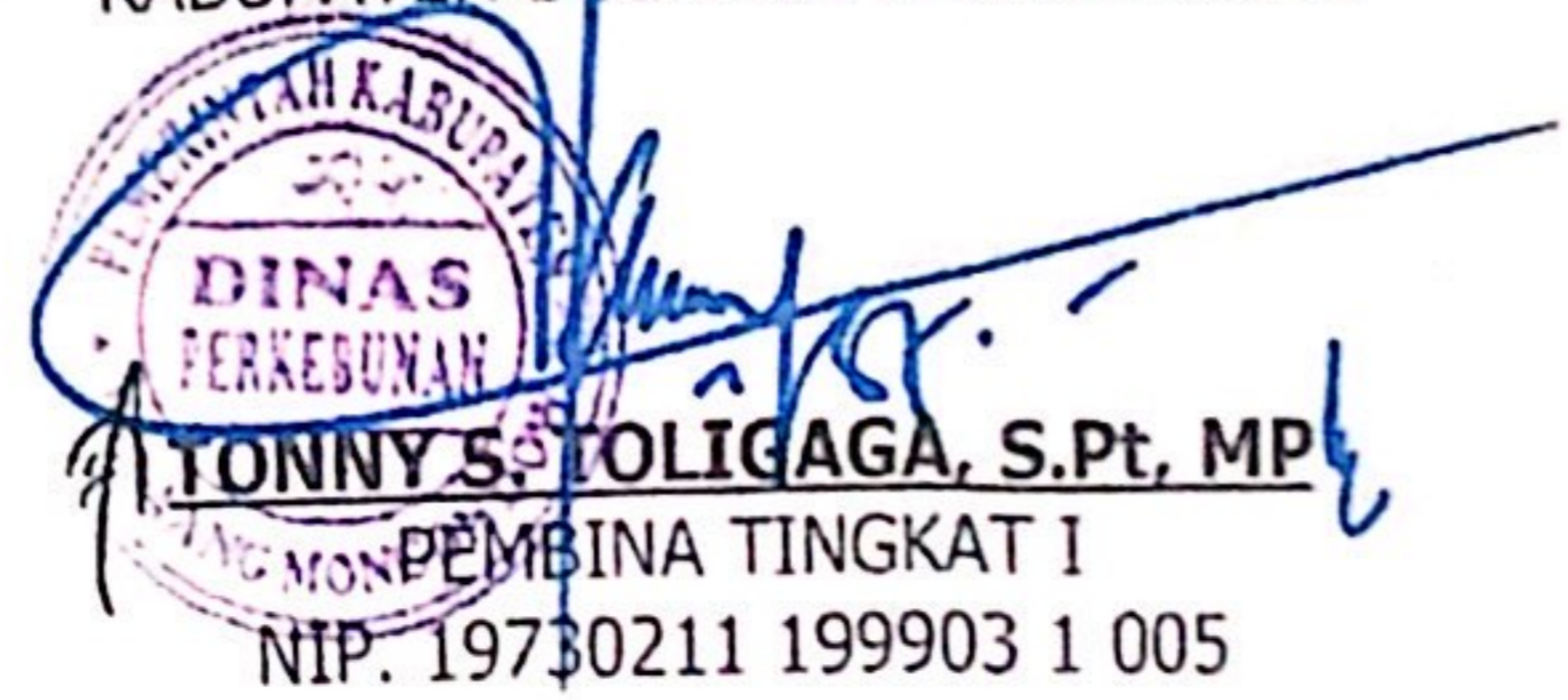
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tim pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan susunan personalisa Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi serta menganalisis data rencana kerja tahun 2024;
 - b. Membahas dan mencermati perencanaan Pembangunan penelitian dan pengembangan daerah
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Renja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Penyusunan Renja 2024 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam melaksanakan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan peru bahan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal : 03 Juni 2023

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


DINAS
PERKEBUNAN
TONNY S. TOLIGAGA, S.Pt, MP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730211 199903 1 005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 20 TAHUN 2023


TANGGAL : 03 JUNI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow
- II. Tim Penyusun
- Ketua : Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kasubag, Program, Keuangan dan Pelaporan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan
 2. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Bina Usaha Perkebunan
 3. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 4. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
 5. Naftali Medi Beka, SE
 6. Herdi Podomi
 7. Norma Gonibala, SP

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


TONNY S. TOLIGAGA, S.Pt. MP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730211 199903 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Ridho-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2024 sehubungan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2024 merupakan rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow yang disusun berdasarkan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 - 2026

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Evaluasi pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022. Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Lolak, Juli 2023

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


TONNY S. TOLIGAGA, S.Pt, MP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730211 199903 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 | 7 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 17 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 19 |
| 2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD | 23 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 28 |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 29 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 29 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 31 |
| 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 31 |
| BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 37 |
| BAB IV. PENUTUP | 42 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Anggaran dan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2022 ----- | 7 |
| Tabel 2.2 | Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan TA. 2022 ----- | 9 |
| Tabel 2.3 | T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan s/d Tahun 2022 ----- | 11 |
| Tabel 2.4 | T-30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan ----- | 16 |
| Tabel 2.5 | Produksi Perkebunan Tahun 2021 dan Tahun 2022 (tibu ton) ----- | 20 |
| Tabel 2.6 | Identifikasi Isu-isu Strategis ----- | 22 |
| Tabel 2.7 | T-C31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 ----- | 24 |
| Tabel 2.8 | Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 ----- | 28 |
| Tabel 3.1 | Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 ----- | 29 |
| Tabel 3.2 | Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2024 ----- | 30 |
| Tabel 3.3 | Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Tahun 2023-2026 ----- | 31 |
| Tabel 3.4 | Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 ----- | 30 |
| Tabel 4.1 | Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023 ----- | 38 |

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sektor perkebunan secara umum terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah. Namun dalam pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow belum optimal. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen tanaman perkebunan yang menurun akibat bertambahnya tanaman tua dan rusak; (2) kondisi sarana dan prasarana belum memadai; (3) penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (6) industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan petani.

Permasalahan lainnya juga ditemukan antara lain keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPD tahun 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Dokumen Renja ini disusun dengan maksud untuk mengefektifkan dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2024 sehingga tujuan pembangunan perkebunan dan tujuan pelayanan publik dapat tercapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perkebunan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
12. Peraturan Bupati nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan ini dimaksudkan untuk :

- 1) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Renja Dinas Perkebunan.
- 2) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan perkebunan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.

b. Tujuan

Renja Dinas Perkebunan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya dalam mencapai target-target yang telah ditentukan, agar lebih terarah, terukur dan bertanggung jawab.

1.4. Sistematika

Sistematika penyajian dokumen Renja Dinas Perkebunan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja perangkat daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD,

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 (n-1) serta pencapaian tahun berjalan tahun 2023 (n) dan perkiraan capaian target tahun 2024 (n+1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional (seperti NSPK, SPM, dan SDGs);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Bagian ini mengemukakan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Bagian ini berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Bagian ini berisikan tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB V PENUTUP, pada bagian ini dikeemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya program dan kegiatan, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah - kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan untuk mengevaluasi kinerja sebuah entitas. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow menerima anggaran sebesar Rp. 9.357.175.562,- dengan Realisasi anggaran mencapai Rp. 8.838.933.736,- atau 94,46% dan realisasi fisik 100%. Adapun rincian anggaran dan realisasi fisik dan keuangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2022

| No. | Nama Program/Kegiatan | PAGU | Realisasi Keuangan | | Fisik |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) |
| | Belanja Operasi Tahun 2022 | 9.357.175.562 | 8.838.933.736 | 94,46 | 100 |
| | Belanja Pegawai | 2.192.297.740 | 1.791.538.755 | 81,72 | 100 |
| | Belanja Barang dan jasa | 6.541.735.862 | 6.478.129.675 | 99,03 | 100 |
| | Belanja Modal | 623.141.960 | 569.265.306 | 91,35 | 100 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 273.356.040 | 272.938.765 | 99,85 | 100 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 349.785.920 | 296.326.541 | 84,72 | 100 |
| I. | Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.404.292.740 | 2.000.965.475 | 93,35 | 100 |
| 1. | Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya | 2.161.937.740 | 1.761.178.755 | 81,46 | 100 |
| 2. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 210.360.000 | 207.860.000 | 98,81 | 100 |
| 3. | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 31.995.000 | 31.926.720 | 99,79 | 100 |
| II. | Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 27.548.000 | 27.425.000 | 99,55 | 100 |
| 1. | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 16.500.000 | 16.500.000 | 100,00 | 100 |
| 2. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 11.048.000 | 10.925.000 | 98,89 | 100 |
| III. | Program Administrasi Umum Perangkat Daerah | 318.602.873 | 311.917.113 | 97,90 | 100 |
| 1. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10.708.500 | 10.661.500 | 99,56 | 100 |
| 2. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 6.993.800 | 5.944.880 | 85,00 | 100 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 3. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.887.500 | 2.580.000 | 89,35 | 100 |
| 4. | Fasilitasi kunjungan tamu | 8.400.000 | 8.160.000 | 97,14 | 100 |
| 5. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 235.044.000 | 228.595.022 | 99,63 | 100 |
| IV. | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 279.131.040 | 278.713.765 | 99,74 | 100 |
| 1. | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 206.000.000 | 205.950.825 | 99,98 | 100 |
| 2. | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 73.131.040 | 72.762.940 | 99,50 | 100 |
| V. | Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00 | 100 |
| 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00 | 100 |
| VI. | Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 253.453.724 | 224.792,945 | 88,69 | 100 |
| 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 499.959.956 | 438.804.671 | 87,77 | 100 |
| 2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 113.024.036 | 105.328.130 | 88,59 | 100 |
| 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7.150.000 | 7.150.000 | 100,00 | 100 |
| VII. | Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 261.821.400 | 255.185.050 | 97,47 | 100 |
| 1. | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 261.820.400 | 255.185.050 | 97,47 | 100 |
| VIII. | Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 765.190.500 | 758.061.600 | 99,07 | 100,00 |
| 1. | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 765.190.500 | 758.061.600 | 99,07 | 100,00 |
| VII. | Program Pembangunan Prasarana Pertanian | 4.730.971.986 | 4.705.424.648 | 99,46 | 100 |
| 1. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 4.730.971.986 | 4.705.424.648 | 99,46 | 100 |
| VIII. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 112.227.500 | 106.037.125 | 94,48 | 100 |
| 1. | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 112.227.500 | 106.037.125 | 94,48 | 100 |
| | Jumlah Total | 9.357.175.922 | 8.838.558.736 | 94,46 | 100 |

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2022 didasarkan pada Renstra Dinas Perkebunan tahun 2017-2022, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan TA. 2022

| No. | Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Kinerja Program dan Kegiatan | | | |
|------|--|--|---------------|---------------|--------|
| | | Indikator | Target | Realisasi | (%) |
| A. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan LayananAdministraasi Perkantoran | 85% | 85% | 100 |
| I. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 1. | Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya | Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 14 bulan | 14 bulan | 100 |
| 2. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pembayaran honor KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 3. | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| II. | Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu | 80% | 100% | 100 |
| 1. | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 22 pasang | 22 pasang | 100 |
| 2. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan | Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 2 orang | 3 orang | 150 |
| III. | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 1. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 44 unit | 44 unit | 100 |
| 2. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 70 unit | 265 unit | 378,57 |
| 3. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 528 eksemplar | 500 eksemplar | 94,70 |
| 4. | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | 240 orang | 240 orang | 100 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|---------------|--------|
| 5. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koodinasi keluar daerah | 52 kali | 52 kali | 100 |
| III. | Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 1. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| IV. | Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah | 10 unit | 22 unit | 220 |
| 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara | 10 unit | 7 unit | 70 |
| 2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 14 unit | 14 unit | 100 |
| 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung kantor | 1 unit | 1 unit | 100 |
| V. | Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah produksi hasil perkebunan | 43.164 Ton | 37.273,31 ton | 86,35 |
| 1. | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | 3 laporan | 4 laporan | 133,33 |
| VI. | Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah produksi hasil perkebunan | 43.164 Ton | 37.273,31 ton | 86,35 |
| 1. | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/tanaman | 10.000 anakan | 30.196 anakan | 301,96 |
| VII. | Program Pembangunan Prasarana Pertanian | Meningkatnya Panjang jalan produksi perkebunan | 10 unit | 27 unit | 270 |
| 1. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | 10 unit | 27 unit | 270 |
| VIII. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah luas serangan yang tertangani | 50 Ha | 50 Ha | 100 |
| 1. | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan | 50 Ha | 50 Ha | 100 |

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bolang Mongondow berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bolang Mongondow berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolang Mongondow:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Kerjasama dengan pihak stakeholders, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat

Tabel 2.3. T – C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan s/d Tahun 2022

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Kinerja Renja tahun 2023 | Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022 | |
|---------------|--|---|---|---|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | Target Kinerja renja tahun 2022 | Realisasi Kinerja renja tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 02.18.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan (%) | 85 | 85 | | | 100 | 100% | - | - |
| 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi keuangan (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | - | - |
| 01 1.02 02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | 14 | - | - |
| 01 1.02 02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | waktu pelayanan administrasi perkantoran (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | - | - |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD (dokumen) | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah (bulan) | -- | - | 12 | 12 | 100 | 12 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (pasang) | - | - | 22 | 22 | 100 | 19 | | |
| | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang) | - | - | 2 | 3 | 150 | 4 | | |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Kinerja Renja tahun 2023 | Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022 | |
|--------------|--|--|---|---|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | Target Kinerja renja tahun 2022 | Realisasi Kinerja renja tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | - | - |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah dan Jenis alat tulis kantor (Jumlah/Jenis) | 17 | 17 | - | - | 100 | - | - | - |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Lembar) | 10.400 | 10.400 | - | - | 100 | - | - | - |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumla komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (unit) | - | - | 44 | 44 | 100 | - | | |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (buah) | - | - | 70 | 265 | 378,57 | 40 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Eksemplar) | 528 | 528 | 528 | 500 | 100 | - | - | - |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Orang yang disediakan Makan Minum (kali) | 240 | 240 | 240 | 240 | 100 | 240 | - | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan (Laporan) | 50 | 50 | 52 | 52 | 100 | 50 | - | - |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (persen) | - | - | 75 | 75 | 100 | 80 | | |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022 | | | Target Kinerja Renja tahun 2023 | Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022 | |
|--------------|---|---|---|---|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | Target Kinerja renja tahun 2022 | Realisasi Kinerja renja tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan (unit) | - | - | 1 | 1 | 100 | - | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit) | - | - | 5 | 5 | 100 | 10 | | |
| 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | - | - |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | - | - |
| 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (%) | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 75 | - | - |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | - | - |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 25 | 18 | 14 | 14 | 100 | 20 | - | - |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | PERTANIAN | | | | | | | | | |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Kinerja Renja tahun 2023 | Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022 | |
|--------------|---|---|---|---|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | Target Kinerja renja tahun 2022 | Realisasi Kinerja renja tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi hasil Perkebunan (Ton) | 43.164 | 37.296,83 | 43.164 | 37.296,83 | 86,41 | | | |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (kelompok tani) | 3 | 10 | 3 | 4 | 133,33 | 1 laporan | | |
| | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (kelompok tani) | 3 | 10 | 3 | 4 | 133,33 | 1 laporan | | |
| 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.000 | 52.300 | 10.000 | 30.196 | 301,96 | 2 dokumen | | |
| | Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan (anakan) | 40.000 | 52.300 | 10.000 | 30.196 | 301,96 | 10.000 | | |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi hasil Perkebunan (Ton) | 43.164 | 37.296,83 | 43.164 | 37.273,31 | 86,35 | | | |
| 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Meningkatnya Panjang Jalan Produksi Perkebunan | 5.000 | 6.937 | 5.000 | 6.937 | 138.74 | 10 unit | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Panjang jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (meter) | 5.000 | 6.937 | 5.000 | 6.937 | 138.74 | 10 unit | | |
| 3.27.05. | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANAN PERTANIAN | Jumlah Produksi hasil Perkebunan (Ton) | 43.164 | 37.296,83 | 43.164 | 37.296,83 | 86,41 | 50 Hektar | | |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022 | | | Target Kinerja Renja tahun 2023 | Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022 | |
|--------------|--|---|---|---|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | Target Kinerja renja tahun 2022 | Realisasi Kinerja renja tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana pertanian Kabupaten/Kota | Adanya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 50 Hektar | | |
| | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jenis obat-obatan Pengendali Hama Perkebunan (jenis) | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 50 Hektar | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis kinerja pelayanan PD menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan indikator kinerja periode 2023-2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Tabel T-30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow

| No | Indikator | SPM | IKK | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----|-----|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2022 (thn n-2) | Tahun 2023 (thn n-1) | Tahun 2024 (thn n) | Tahun 2025 (thn n+1) | Tahun 2022 (thn n-2) | Tahun 2023 (thn n-1) | Tahun 2024 (thn n) | Tahun 2025 (thn n+1) | |
| 1. | Jumlah Produksi Perkebunan yang dipasarkan | - | - | 50.000 Ton | - | - | - | 37.273,31 ton | | - | - | |
| 2. | Jumlah produksi hasil perkebunan komoditi kemiri | - | - | 550 ton | - | - | - | 469,17 ton | | - | - | |
| 3. | Jumlah Produksi hasil perkebunan Komoditi Kelapa () | - | - | 34.000 ton | - | - | - | 29.993,61 ton | | - | - | |
| 4. | Jumlah Produksi hasil perkebunan Komoditi Gengkeh () | - | - | 1.600 ton | - | - | - | 0,01 ton | | - | - | |
| 5. | Jumlah Produksi hasil perkebunan Komoditi Kakao () | - | - | 5.000 ton | - | - | - | 3.788,00 ton | | - | - | |
| 6. | Jumlah Produksi hasil perkebunan Komoditi Kopi () | - | - | 4.000 ton | - | - | - | 2.972,83 ton | | - | - | |
| 7. | Jumlah Produksi hasil perkebunan Komoditi Pala () | - | - | 40 ton | - | - | - | 42,04 ton | | - | - | |
| 8. | Cakupan petani pekebun yang menggunakan teknologi perkebunan | - | - | 30 poktan | - | - | - | 13 Poktan | | - | - | |
| 9. | Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah | - | - | - | 63 angka | 70 angka | 73 angka | - | - | 70 angka | 73 angka | |
| 10. | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (6 komoditi) | - | - | - | -9.00% | -5.50% | -2.00% | - | - | -2.00% | -2.00% | |

Berdasarkan tabel diatas, ada perubahan indikator dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023-2024. Hal ini sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 yakni dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota melalui pemilih serentak Nasional pada tahun 2024.

Sehingga Adanya aturan ini menggambarkan bahwa daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2024 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Sehingga disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menilai tingkat kinerja pelayanan Dinas Perkebunan, dengan indikator kinerja utama Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Pertanian (%) dengan target 8,0 realisasi 32,17% Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bolaang Mongondow hanya sampai dengan tahun 2020. Untuk tahun 2021 s/d tahun 2022 tidak ada data spesifik mengenai kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian, sehingga hasil capaian kinerja terhadap sasaran tahun 2020 s/d Tahun 2022 menggunakan data terakhir yang dirilis oleh BPS pada tahun 2020.

Realisasi capaian kinerja terhadap Renstra dihitung berdasarkan rata-rata kontribusi sub sektor perkebunan tahun 2017 s/d 2022 sebesar 30,51%. Untuk Capaian indikator kinerja terhadap Renstra melebihi target yang ditetapkan, capaian kinerja tersebut jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori "SANGAT BERHASIL".

Realisasi kinerja tahun 2022 terhadap standar Nasional. Capaian produksi perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Produksi Perkebunan Tahun 2020 dan tahun 2021 (ribu ton)

| Tahun | Kabupaten | Provinsi | Nasional |
|-------|-----------|----------|----------|
| 2021 | 36.72 | 279.7 | 4.341,1 |
| 2022 | 36.73 | 280.0 | 4.334.4 |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa produksi perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2022 sebesar 36,73 ribu ron mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah produksi perkebunan pada tahun 2021 sebesar 36,72 ribu ton. Sedangkan untuk tingkat provinsi mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan jumlah produksi 280 ribu ton dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2021 sebesar 279,7 ton. Produksi perkebunan untuk tingkat nasional pada tahun 2022 sebesar 4.334,4 ribu ton mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi perkebunan pada tahun 2021 sebesar 3.431,1 ribu ton.

2.3.2 Identifikasi permasalahan/hambatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah **Sangat Berhasil**, akan tetapi secara indikator sasaran khususnya pada indikator Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan indikator Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan belum bisa memenuhi target. Hal ini terjadi disebabkan oleh :

1. Kemampuan dana APBD yang dialokasikan masih sangat terbatas untuk penyediaan teknologi berupa bantuan peralatan dan mesin pertanian untuk kelompok tani perkebunan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Perkebunan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis dan pendampingan petani/kelompok tani di lapangan.

2.3.3 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan

Pengembangan pelayanan dinas perkebunan menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini beberapa tantangan dan peluang tersebut:

Tantangan

1. Perubahan iklim dapat mempengaruhi siklus tanam dan hasil panen
2. Pengendalian hama dan penyakit dapat berubah distribusinya
3. Lahan perkebunan yang semakin terbatas karena alih fungsi lahan untuk kebutuhan yang lain
4. Rendahnya adopsi teknologi oleh petani karena faktor biaya atau kurangnya pengetahuan
5. Fluktuasi harga komoditas perkebunan yang seringkali merugikan petani kecil
6. Kapabilitas sumber daya manusia yang terbatas

Peluang

1. Penggunaan aplikasi dan platform digital untuk manajemen lahan dan pemasaran hasil perkebunan
2. Mengembangkan berbagai jenis tanaman perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi dan tahan terhadap perubahan iklim
3. Produk olahan hasil perkebunan dapat meningkatkan nilai tambah
4. Program kemitraan dengan Perusahaan untuk penyerapan hasil panen dan transfer teknologi
5. Kebijakan Pemerintah yang mendukung pengembangan sektor perkebunan
6. Program subsidi dan bantuan sarana prasarana bagi petani perkebunan untuk meningkatkan produktivitas

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, Dinas Perkebunan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.4 Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Pembangunan perkebunan tidak terlepas dari pengaruh isu-isu strategis yang ada, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Pada lingkungan regional yang dominan mempengaruhi perubahan pembangunan perkebunan meliputi degradasi kualitas

sumber daya alam, pengembangan teknologi perkebunan dan permintaan terhadap pupuk organik.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.6 Identifikasi isu-isu strategis

| NO | ISU LOKAL | ISU NASIONAL |
|----|---|---|
| 1 | - Bolaang Mongondow merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan sub sektor perkebunan yang cukup tinggi namun pelaksanaan pembangunan perkebunan di kabupaten Bolaang Mongondow belum terlaksana secara maksimal | - Kebutuhan bahan baku industry perkebunan semakin hari semakin meningkat sehingga membutuhkan dukungan suplay bahan baku dari daerah-daerah yang memiliki potensi perkebunan yang cukup tinggi. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan Dinas Perkebunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Sebagai Satu-Satunya Perangkat Daerah Mandiri Di Antara Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Memberikan Peluang Dan Harapan Baru Dalam Pembangunan Perkebunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Kedepan - Sarana Dan Prasarana Untuk Akses Perdagangan Produksi Hasil Perkebunan Mulai Terbuka Di Kabupaten Bolaang Mongondow Baik Melalui Jalur Laut, Sehingga Memberikan Peluang Untuk Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow ke luar daerah. | - Saat ini pemerintah pusat sedang melaksanakan program komoditi unggulan daerah dan kabupaten Bolaang Mongondow di tetapkan menjadi daerah dengan komoditi unggulan Kakao, Kelapa dan Cengkeh hal ini dapat menjadi prospek jangka panjang terhadap pembangunan usaha perkebunan khususnya keberadaan Industri-Industri Perkebunan |

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan terdapat beberapa perubahan terhadap program dan kegiatan Dinas Perkebunan karena disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan serta kebutuhan untuk rencana kerja tahun 2024

Dari tinjauan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah yang menyangkut indikator target kinerja, target capaian, pagu indikatif, dan kebutuhan dana yang harus disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 – 2026. Review rancangan awal RKPD Tahun 2024 pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.7. Tabel T-C31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|----|--|--------|--|----------------|----------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp.) | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Indeks pelayanan publik organisasi perangkat daerah | 75 angka | 3.115.199.179 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Indeks pelayanan publik organisasi perangkat daerah | 75 angka | 3.115.199.179 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan SDN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | 90% | 2.395.201.924 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan SDN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | 90% | 2.395.201.924 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 20 orang/bulan | 2.138.850.528 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 20 orang/bulan | 2.138.850.528 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 dokumen | 193.360.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 dokumen | 193.360.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 12 laporan | 62.991.396 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 12 laporan | 62.991.396 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah | 12 dokumen | 49.974.900 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah | 12 dokumen | 49.974.900 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 20 paket | 19.980.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 20 paket | 19.980.000 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 4 Orang | 11.048.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 4 Orang | 11.048.000 |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|----|---|--------|--|----------------|----------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp.) | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100% | 325.227.506 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100% | 325.227.506 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 paket | 10.674.186 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 paket | 10.674.186 |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | 12 laporan | 13.678.320 | Fasilitas Kunjungan Tamu | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | 12 laporan | 13.678.320 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 50 laporan | 300.875.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 50 laporan | 300.875.000 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | 9 unit | 109.925.742 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | 9 unit | 109.925.742 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 unit | 109.925.742 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 unit | 109.925.742 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 12.300.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 12.300.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 12.300.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 12.300.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 49 unit | 222.569.107 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 49 unit | 222.569.107 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 10 unit | 213.134.107 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 10 unit | 213.134.107 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 20 Unit | 9.435.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 20 Unit | 9.435.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | 1 Unit | 35.684.100 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | 1 Unit | 35.684.100 |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|----|---|--------|---|----------------|----------------------|---|--------|---|----------------|----------------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp.) | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | -5,5% | 1.836.337.338 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | -5,5% | 1.836.337.338 |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | 586.707.838 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | 586.707.838 |
| | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | 586.707.838 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | 586.707.838 |
| | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme | 2 Dokumen | 1.249.629.500 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme | 2 Dokumen | 1.249.629.500 |
| | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 10000 anakan | 1.249.629.500 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 10000 anakan | 1.249.629.500 |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | -5,5% | 3.648.568.338 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | -5,5% | 3.648.568.338 |
| | Pembangunan Prasarana Pertanian | | Panjang Jalan Produksi Perkebunan yang Terbangun | 10 unit | 3.648.568.338 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | Panjang Jalan Produksi Perkebunan yang Terbangun | 10 unit | 3.648.568.338 |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 10 unit | 3.648.568.338 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 10 unit | 3.648.568.338 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 0,52 % | 262.515.916 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 0,52 % | 262.515.916 |
| | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | Jumlah luas serangan yang tertangani | 50 Ha | 262.515.916 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | Jumlah luas serangan yang tertangani | 50 Ha | 262.515.916 |
| | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 50 Ha | 262.515.916 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 50 Ha | 262.515.916 |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|----|--|--------|---|----------------|----------------------|--|--------|---|----------------|----------------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp.) | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian | 0.03 angka | 115.999.916 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian | 0.03 angka | 115.999.916 |
| | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | Jumlah Kegiatan Penyuluhan | 3 Kecamatan | 115.999.916 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | Jumlah Kegiatan Penyuluhan | 3 Kecamatan | 115.999.916 |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan | 2 unit | 115.999.916 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan | 2 unit | 115.999.916 |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi baik dari hasil penelaahan prioritas pembangunan daerah, dan isu-isu strategis (teknokratis), yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD. Berdasarkan musrenbang (partisipatif) tidak ada usulan yang ditujukan kepada Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Besaran/ Volume | Catatan Penting | Ket. |
|------|--|---------------|--|-------------------|---|------|
| 2 | Pilihan | | | | | |
| 2 | Pertanian | | | | | |
| I. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | | Jumlah hasil produksi perkebunan | 39.000 Ton | | |
| 1. | Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | 15 Kecamatan | Jumlah kelompok tani perkebunan penerima sarana pendukung pertanian | 36 Usulan | Kegiatan Prioritas hasil Muserenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023 | |
| 2. | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tumbuhan | 15 Kecamatan | Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan | 57 Usulan | Kegiatan Prioritas hasil Muserenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023 | |
| II. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 39.000 ton | | |
| 3. | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani | 15 Kecamatan | Panjang jalan produksi perkebunan | 37 Usulan | Kegiatan Prioritas hasil Muserenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023 | |
| III. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 39.000 ton | | |
| 4. | Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | 15 Kecamatan | Jenis bahan kimia dan obat-obatan pengendali organisme pengganggu tanaman perkebunan | 1 Usulan | Kegiatan Prioritas hasil Muserenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023 | |
| VI. | Program Penyuluhan Pertanian | | Terselenggaranya penyuluhan pertanian | 3 kec. | | |
| 5. | Pengembangan Kapasitas Kelmbagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 3 Kecamatan | Terlaksananya pembinaan pada kelompok tani | 150 orang | Kegiatan Prioritas SKPD | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pencapaian Visi **“TERWUJUDNYA INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perkebunan memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024

| TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024: MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | |
|---|---|
| Prioritas Nasional | |
| PRIORITAS 1 | Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem |
| PRIORITAS 2 | Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan |
| PRIORITAS 3 | Pelaksanaan PEMILU 2024 |
| PRIORITAS 4 | Revitaliasi industry dan penguatan riset terapan |
| PRIORITAS 5 | Penguatan daya saing usaha |
| PRIORITAS 6 | Pembangunan rendah karbon dan transisi energi |
| PRIORITAS 7 | Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan konektivitas |
| PRIORITAS 8 | Pembangunan Ibu Kota Nusantara |

Adapun kebijakan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2024

| TEMA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023: "Revitalisasi daya saing melalui penguatan infrastruktur dan sumberdaya manusia serta kualitas lingkungan hidup". | |
|--|---|
| Prioritas Daerah | |
| PRIORITAS 1 | Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima |
| PRIORITAS 2 | Peningkatan kualitas Pendidikan |
| PRIORITAS 3 | Peningkatan kualitas tata Kelola Pemerintahan |
| PRIORITAS 4 | Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN |
| PRIORITAS 5 | Stabilitas daerah yang terjamin dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak |
| PRIORITAS 6 | Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan |
| PRIORITAS 7 | Pemetaan potensi investasi dan promosi |
| PRIORITAS 8 | Penguatan koperasi, UMKM dan industri pengolahan |
| PRIORITAS 9 | Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city |
| PRIORITAS 10 | Pemerataan Pembangunan |

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah tahun 2024, Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow mendukung secara tidak langsung prioritas Pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan yaitu menyelenggarakan urusan dibidang Perkebunan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sehingga dukungan Dinas Perkebunan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan daerah tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan di daerah melalui indikator kinerja utama dinas perkebunan dalam mendorong sektor pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan serta upaya mendorong Ketersediaan dan distribusi pangan. Semua itu dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan pemerintah bidang pertanian, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow yang awalnya adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, berubah nama menjadi Dinas Perkebunan sesuai Surat Penetapan OPD Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang mulai berlaku tahun 2017. Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Untuk mencapai visi daerah, maka Tujuan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow erat kaitannya dengan misi nomor 3 yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri bertumpu pada Potensi Sumberdaya Lokal dengan tujuan Pembangunan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Tahun 2023-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja Aparatur | Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah |
| 2 | Meningkatnya Kontribusi Hasil Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Produksi Tanaman | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (6 Komoditi) |

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 5 (lima) program utama yang kemudian dijabarkan kedalam 11 (sebelas) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tertib dan Akuntabel, kegiatan-kegiatannya meliputi :
- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Fasilitasi kunjungan tamu
 - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan, dengan kegiatan :
- 1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian, sub kegiatan pendampingan, penggunaan sarana pendukung pertanian

- 2) Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan
- C. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan, dengan kegiatan :
 - 1) Pembangunan prasarana pertanian, sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani.
- D. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- E. Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator terselenggaranya penyuluhan pertanian, dengan kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, sub kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa.

Adapun Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 T-C. 33. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|--|---|--|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|--|---------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | 6.583.131.618 | | | 8.556.384.756 | | | | |
| 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.684.332.640 | | | 2.656.384.756 | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.080.622.122 | | | 2.077.591.016 | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 80,83 % | 14 bulan | 12 bulan | 1.834.812.495 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 1.835.236.016 |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu | Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 80,83 % | 12 bulan | 12 bulan | 207.360.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 210.360.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 80,83 % | 1 Dokumen | 12 bulan | 38.449.627 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 31.995.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 27.548.000 | | | 36.048.000 | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu | | 80,83 % | 22 stel | 80 % | 16.500.000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 25.000.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu | | 80,83 % | 4 Orang | 80 % | 11.048.000 | Penerimaan Pembiayaan | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 11.048.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 272.367.335 | | | 241.993.800 | | | | |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|---|--|--|---------|------------|----------|--------------------|-------------------------------|--|--|---------|--------------------|
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 80,83 % | 40 unit | 12 bulan | 9.025.335 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 6.993.800 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 80,83 % | 240 orang | 12 bulan | 8.788.000 | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 8.400.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 80,83 % | 50 Laporan | 12 bulan | 254.554.000 | Penerimaan Pembiayaan | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 213.004.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 89.209.590 | | | | | 53.682.640 |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 80,83 % | 8 Unit | 80 % | 89.209.590 | Penerimaan Pembiayaan | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 53.682.640 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 9.840.000 | | | | | 24.000.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 80,83 % | 12 bulan | 80 % | 9.840.000 | Penerimaan Pembiayaan | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 24.000.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 204.745.593 | | | | | 223.069.300 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara | Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | | 80,83 % | 10 unit | 75 % | 159.626.493 | Penerimaan Pembiayaan | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 108.769.300 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | | 80,83 % | 20 Unit | 75 % | 9.435.000 | Penerimaan Pembiayaan | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 14.300.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara | Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | | 80,83 % | 1 Unit | 75 % | 35.684.100 | Penerimaan Pembiayaan | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 80,83 % | 100.000.000 |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|--|---|---|---|--|------------|----------------------|---------------|---------------|--|----------------------|---|------------|---------------|
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | 1.198.978.500 | | | | 1.650.000.000 | | |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | 569.944.500 | | | | 900.000.000 | | |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | -9,00 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 569.944.500 | Penerimaan Pembiayaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | -9,00 % | 900.000.000 |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | 629.034.000 | | | | 750.000.000 | | |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme | | -9,00 % | 10000 anakan | 2 Dokumen | 629.034.000 | Penerimaan Pembiayaan | | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | -9,00 % | 750.000.000 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | 2.366.642.520 | | | | 3.500.000.000 | | |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | 2.366.642.520 | | | | 3.500.000.000 | | |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Panjang Jalan Produksi Perkebunan yang Terbangun | | -9,00 % | 10 Unit | 10 unit | 2.366.642.520 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | -9,00 % | 3.500.000.000 |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | | | 112.774.500 | | | | 300.000.000 | | |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | | 112.774.500 | | | | 300.000.000 | | |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Jumlah luas serangan yang tertangani | | 0,41 % | 50 Ha | 50 Ha | 112.774.500 | Penerimaan Pembiayaan | | Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 0,41 % | 300.000.000 |
| 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | | 220.403.458 | | | | 450.000.000 | | |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | 220.403.458 | | | | 450.000.000 | | |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan | Jumlah Kegiatan Penyuluhan | | 0,03 angka | 3 Kelompok Tani | 3 Kecamatan | 220.403.458 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian | 0,03 angka | 450.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 6.583.131.618 | | | | 8.556.384.756 | | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2023 – 2026, Rencana Strategis tahun 2023 - 2026 dan RKPD tahun 2024, maka untuk mencapai target kinerja dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan pada perangkat daerah.

Program dan kegiatan masing-masing urusan berdasarkan perangkat daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

- A. Program yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah yaitu
 - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- B. Urusan Pilihan Pertanian
 - 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 4. Program Penyuluhan Pertanian

Pendanaan program yang dijabarkan dalam uraian kegiatan atau pagu indikatif, merupakan batasan anggaran yang diberikan pada masing-masing program dan kegiatan. Untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jumlah pendanaan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan kebutuhan serta efisiensi anggaran dan tepat sasaran. Pendanaan program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------|----------------|---|--|---|--|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | | | | | | | | | 6.583.131.618 | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | | | | | | | | 2.684.332.640 | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | | | | | | | 2.080.622.122 | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 80,83 % | 14 bulan | 12 bulan | 1.834.812.495 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu | Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 80,83 % | 12 bulan | 12 bulan | 207.360.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 80,83 % | 1 Dokumen | 12 bulan | 38.449.627 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | | | | | | | | | | 27.548.000 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu | | 80,83 % | 22 stel | 80 % | 16.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|--|--|--|---------|------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu | | 80,83 % | 4 Orang | 80 % | 11.048.000 | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 272.367.335 | | |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 80,83 % | 40 unit | 12 bulan | 9.025.335 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 80,83 % | 240 orang | 12 bulan | 8.788.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 80,83 % | 50 Laporan | 12 bulan | 254.554.000 | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 89.209.590 | | |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 80,83 % | 8 Unit | 80 % | 89.209.590 | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 9.840.000 | | |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 80,83 % | 12 bulan | 80 % | 9.840.000 | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 204.745.593 | | |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara | Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | | 80,83 % | 10 unit | 75 % | 159.626.493 | Penerimaan Pembiayaan |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|---|---|--|---------|--------------|-----------|----------------------|--|
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | | 80,83 % | 20 Unit | 75 % | 9.435.000 | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | | 80,83 % | 1 Unit | 75 % | 35.684.100 | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | 1.198.978.500 | |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | | 569.944.500 | |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | -9,00 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 569.944.500 | Penerimaan Pembiayaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 629.034.000 | |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme | | -9,00 % | 10000 anakan | 2 Dokumen | 629.034.000 | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | 2.366.642.520 | |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | | 2.366.642.520 | |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Panjang Jalan Produksi Perkebunan yang Terbangun | | -9,00 % | 10 Unit | 10 unit | 2.366.642.520 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | | | | 112.774.500 | |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | | | 112.774.500 | |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Jumlah luas serangan yang tertangani | | 0,41 % | 50 Ha | 50 Ha | 112.774.500 | Penerimaan Pembiayaan |

Rencana Kinerja Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---------------------------------------|---|----------------------------|--|------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | | 220.403.458 | | |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | 220.403.458 | | |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan | Jumlah Kegiatan Penyuluhan | | 0.03 angka | 3 Kelompok Tani | 3 Kecamatan | 220.403.458 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah perencanaan teknis operasional tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan implikasi kebijakan pembangunan nasional (RPJP Nasional, RPJM Nasional dan RKP Nasional), Penjabaran Kebijakan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Renja ini merupakan pedoman dan arahan bagi pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2024. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan Renja Dinas Perkebunan Tahun 2024 serta mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan pertanian, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lolak, Juli 2023

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


TONNY S. TOLIGAGA, S.Pt, MP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730211 199903 1 005